

***PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR)***  
**METODOLOGI ALTERNATIF RISET DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT TRANSFORMATIF <sup>1</sup>**

**Oleh:**  
**Agus Afandi <sup>2</sup>**

**A. Latar Belakang**

Semakin kuatnya paradigma pembangunan mainstream yang struktur dasarnya adalah “pertumbuhan ekonomi” dan “modernisasi” yang dibangun di atas akar budaya “materialistik”, “konsumtif”, “hedonistik”, “persaingan”, dan “eksploitasi tanpa batas” atau “keserakahan” demi akumulasi kapital yang tanpa batas pula.

Semakin kuatnya praktek “neo-liberalisme” yang mewujud dalam bentuk: pasar bebas hambatan (kapital, barang dan jasa), penghapusan subsidi sosial, deregulasi, privatisasi perusahaan negara (bank, rumah sakit, telekomunikasi, kereta api, jalan tol, air bersih, listrik, minyak bumi dan lain-lain), dijadikannya barang publik menjadi barang komersial yang hanya menguntungkan bagi kekuatan kapital global.

Dampak yang ditimbulkan adalah ketimpangan yang semakin meluas, kerusakan lingkungan, konflik budaya, konflik perebutan sumber daya, menurunnya kualitas kehidupan manusia, dan semakin terancamnya keberlangsungan kehidupan manusia.

**B. Kecenderungan Nasional**

Di sisi lain kondisi nasional cenderung mengarah pada kondisi yang timpang dan melemah, sehingga muncul persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Semakin lemahnya institusi negara dalam melindungi dan melayani hak-hak rakyat, terutama rakyat lemah (*powerless*). Hak petani, buruh, nelayan, dan masyarakat miskin terkalahkan dengan kepentingan pemilik modal.
2. Dalam masa transisi politik dan demokrasi, masih sangat kental dengan nuansa formalisme dan pragmatisme politik, sehingga hakekat demokrasi belum tercapai.
3. Meluasnya konflik sosial budaya dan perebutan sumber daya. Konflik sosial di berbagai daerah karena aspek politik, etnis, dan perebutan sumberdaya menjadi persoalan krusial yang sensitif dan sulit diselesaikan.
4. Merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme di berbagai lini kehidupan. Meskipun telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi belum mampu mengeliminir praktek KKN, baik yang terjadi pada birokrasi maupun di masyarakat.

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam kegiatan Workshop Pengabdian Berbasis Riset di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 22 Pebruari 2020.

<sup>2</sup> Peneliti dan Dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel.

5. Memudarnya komitmen moral, etika politik dan keteladanan, sehingga menciptakan masyarakat yang tidak percaya diri. Hal ini juga terjadi pada jajaran pimpinan nasional, daerah, dan pemimpin agama.
6. Rendahnya kualitas kepemimpinan nasional dan daerah, serta memudarnya kepercayaan publik terhadapnya, termasuk kepada pimpinan agama. Kepercayaan masyarakat kepada pemimpin terus semakin merosot akibat komitmen moral, etika politik, dan keteladanan tidak nampak pada para pemimpin tersebut.
7. Seiring dengan rendahnya komitmen moral, supremasi hukum dan kondisi krisis ekonomi, maka tingkat kejahatan semakin tinggi, baik terhadap badan maupun barang.
8. Tidak jelasnya arah otonomi daerah berakibat pada munculnya penguasa-penguasa daerah yang lebih eksploitatif dibanding penguasa pusat. Terbukti banyak OTT kepala daerah.
9. Rusaknya dan semakin terbatasnya daya dukung lingkungan. Akibat adanya eksploitasi besar-besaran sumber daya alam, tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Bencana alam, longsor, dan banjir akibat rusaknya lingkungan menjadi bukti nyata rusaknya lingkungan hidup.

#### **C. Situasi Praktek Keberagamaan Masyarakat**

Praktek keberagamaan masyarakat dewasa ini tergambar dalam uraian berikut:

1. Praktek keberagamaan masyarakat (secara individu maupun kolektif) masih sangat kental dengan nuansa tekstual dan simbolik (ritual). Situasi ini bisa mengarahkan kepada pemahaman yang menumbuhkan perilaku fundamentalis bahkan radikal. Praktek keberagamaan masih belum banyak memberikan inspirasi dan pencerahan terhadap konteks problem kehidupan sosial masyarakat.
2. Praktek keberagamaan masyarakat belum mampu menciptakan komitmen moral yang kuat (emosional, rasional, dan spiritual) sebagai landasan penyelesaian atas problem kehidupan sosial umat.
3. Kuatnya paradigma normatif dalam keilmuan Islam dan terbatasnya kajian-kajian kritis sosial keagamaan, menyebabkan rendahnya produksi ilmu pengetahuan sosial keagamaan yang emansipatoris.
4. Lemahnya peran strategis lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam melakukan pencerahan dan perubahan sosial transformatif.

#### **D. Perlunya Perubahan Sistem Pendidikan Masyarakat**

Pendidikan dan agama memiliki peran yang sangat strategis dalam menjawab berbagai persoalan dan mengarahkan perubahan sosial. Oleh karena itu, persoalan sosial yang terjadi akan selalu mempertanyakan eksistensi pendidikan dan agama yang selama ini menjadi bagian masyarakat. Sudahkah pendidikan dan agama mampu memberikan solusi bagi setiap problem sosial. Kalau tidak mampu memecahkan, berarti dimana letak permasalahannya.

Kurikulum pendidikan agama yang ada sekarang dinilai belum menjawab perubahan-perubahan global dan nasional. Karena itu diperlukan keberanian bagi lembaga-lembaga pendidikan melakukan perubahan fundamental model pendidikan yang dijalankan, termasuk pendidikan agama.

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sebagai bagian dari tri darma perguruan tinggi perlu ditinjau kembali. PKM model lama yang prakteknya lebih mencerminkan PKM model kuli atau tukang (yang berparadigma penyuluhan dan pembinaan) jelas sangat tidak relevan dengan perubahan-perubahan saat ini.

Untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya menjawab tantangan sosial keagamaan masyarakat, PKM haruslah diberi orientasi dan makna baru, landasan paradigma baru, serta metodologi yang baru pula.

### **E. Pendekatan Alternatif *Participatory Action Research* (PAR)**

Pendekatan PKM dengan *Participatory Action Research* (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan<sup>3</sup>, dan proses perubahan sosial keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan ini merupakan sarana untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif atas adanya belenggu-belenggu ideologi globalisasi neoliberal dan belenggu paradigma keagamaan normatif yang menghambat proses transformasi sosial keagamaan.<sup>4</sup>

PKM dengan pendekatan ini bisa dikatakan PKM Transformatif. Hal ini karena merupakan proses riset yang berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan. Argumentasi ini didasarkan pada bahwa proses riset transformatif berarti merupakan:

1. Sebuah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri kelompok masyarakat yang miskin/lemah, terpinggirkan, dan tertindas.
2. Proses dari, oleh dan untuk masyarakat. Posisi masyarakat didampingi/difasilitasi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif agar lebih mandiri dalam mengembangkan kualitas kehidupannya.
3. Menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi peningkatan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama.
4. Upaya melepaskan berbagai bentuk dominasi budaya, tekanan politik, eksploitasi ekonomi, dan hegemoni institusi agama yang membelenggu dan menghalangi upaya masyarakat menentukan cara hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya.<sup>5</sup>

Pilihan riset yang bertujuan transformasi sosial ini, maka digunakan istilah yang lebih familier dengan PAR, maka proses riset dilaksanakan dengan upaya sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan transformasi sosial.

---

<sup>3</sup> Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hal. 422

<sup>4</sup> Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan kaum Beriman*. (Jakarta: Paramadina, 2001). 273-274.

<sup>5</sup> Ibid.

## F. Prinsip Kerja PKM yang Berorientasi Pemberdayaan

Beberapa prinsip kerja Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang berorientasi pemberdayaan ini harus memenuhi unsur-unsur pemberdayaan. Adapun pemberdayaan harus selalu mengupayakan tiga dimensi sekaligus: pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah praktis, pengembangan ilmu pengetahuan dan keberagaman masyarakat, dan proses perubahan sosial keberagaman. Dengan demikian maka masyarakat adalah agen utama perubahan sosial keagamaan, sehingga dosen/mahasiswa pelaksana PKM merupakan pihak lain yang melakukan fasilitasi dari proses perubahan tersebut. Oleh sebab itu, dosen/mahasiswa harus menghormati peran utama masyarakat. Dosen/mahasiswa dan masyarakat harus saling bahu membahu secara partisipatif untuk melakukan perubahan sosial.<sup>6</sup>

Dalam PKM PAR, pemberdayaan adalah cara (pendekatan) dan bukan solusi dari setiap persoalan yang terjadi pada masyarakat. Karena pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan kemandirian masyarakat dari sifat ketergantungan pada pihak lain. Apabila masyarakat telah berhasil membangun kemandirian maka perubahan sosial akan terjadi dengan sendirinya.<sup>7</sup>

Paradigma PKM yang berorientasi pemberdayaan masyarakat ini dimulai dengan sesuatu yang simple dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya mengembang dalam skala kelompok-kelompok masyarakat yang pada akhirnya mencapai titik skala masyarakat luas. Oleh sebab itu, potensi apapun yang ada dalam masyarakat semestinya digunakan sebagai alat perubahan. Baik potensi agama, budaya, sumberdaya manusia (pengalaman hidup, kecerdasan dan kearifan lokal), dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh komunitas masyarakat. Sehingga dengan demikian PKM dengan sendirinya merupakan proses transformasi situasi sosial, termasuk keberagaman masyarakat melalui kekuatan kolektif mereka. Maka dosen/mahasiswa dengan PKM ini harus mendorong partisipasi dan kontrol masyarakat secara konsisten, sehingga sampai pada memunculkan kemampuan kekuatan masyarakat secara maksimal dan memperkecil ketergantungan mereka pada pihak lain.<sup>8</sup>

Ilmu pengetahuan lokal dan kearifan tradisional merupakan alat perubahan yang efektif untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan multi sektor dan multi disiplin merupakan cara yang dilakukan dalam PKM transformatif ini. Bukan saja pendekatan bagi tim PKM dosen/mahasiswa, tetapi juga oleh masyarakat sendiri. Oleh karenanya, dialog kritis harus diutamakan. Tim PKM tidak diperkenankan menggurui dan harus menghindari pendekatan doktrinal yang cenderung memaksakan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Ahmad Mahmudi, *Kuliah Pengantar tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2002 ). Hal 2.

<sup>7</sup> Kusnaka Adi Mihadja dan Harry Hikmat, *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2003), hal 12-15.

<sup>8</sup> Ahmad Mahmudi, *Kuliah Pengantar tentang Pembangunan*. Hal 6.

Secara rinci prinsip-prinsip kerja PKM yang berorientasi pada perubahan sosial terurai sebagai berikut.<sup>9</sup>

- (1) Memungkinkan kelompok-kelompok dan kelas-kelas yang tertindas memperoleh cukup pengaruh (*leverages*) yang kreatif dan transformis seperti terungkap dalam proyek-proyek, kegiatan-kegiatan dan perjuangan-perjuangan yang khusus.
- (2) Menghasilkan dan membangun proses-proses pemikiran sosio-politik yang dapat dijadikan sarana untuk mengidentifikasi basis-basis kemasyarakatan. Yang dimaksud basis-basis kemasyarakatan disini adalah kelompok – kelompok potensial yang dapat didorong dalam proses perubahan sosial.
- (3) Mengembangkan riset secara bersama-sama. Seperti PRA (*Participatory Rural Appraisal*) ataupun PAR (*Participatory Action Research*) haruslah dikerjakan secara bersama antara fasilitator perubahan sosial dengan komunitas. Yang dimaksud bersama-sama di sini adalah **kerjasama (kolaborasi)**. Kolaborasi adalah semua yang memiliki tanggung jawab atas tindakan perubahan dilibatkan dalam upaya-upaya meningkatkan kemampuan mereka. Kelompok kerjasama itu secara terus-menerus diperluas dengan melibatkan secara langsung sebanyak mungkin mereka yang terkait dengan persoalan yang dihadapi.
- (4) Berpihak kepada komunitas yang paling tidak berdaya. Sering kali program-program pengembangan komunitas tidak melibatkan masyarakat yang terabaikan. Meskipun secara retorika politik, program tersebut disusun di atas derita masyarakat terabaikan (baca: mereka ditulis sebagai sasaran pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi tidak pernah disentuh).
- (5) **Menjamin terjadinya Penemuan kembali Sejarah secara Kritis.** Hal ini merupakan upaya untuk menemukan kembali secara selektif, melalui ingatan bersama, elemen-elemen masa lalu yang telah terbukti berguna dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan kelas-kelas yang dieksploitasi dan yang bisa dipergunakan dalam perjuangan masa kini untuk meningkatkan penyadaran. Pola ini umumnya dikenal dengan belajar dari pengalaman.
- (6) **Menilai dan Menerapkan Kebudayaan Masyarakat.** Hal ini didasarkan pada pengakuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang esensial dan utama di kalangan masyarakat di setiap daerah.
- (7) Partisipasi selalu **dimulai dari suatu yang kecil dengan perubahan skala kecil.** Setelah kelompok sosial dan individu dapat mengelola dan mengontrol perubahan tersebut, kemudian bekerja menuju pada pola perubahan yang lebih luas.
- (8) **Memulai dengan proses siklus perencanaan, tindakan, evaluasi dan refleksi dalam skala kecil** sehingga dapat membantu orang yang terlibat dalam merumuskan isu-isu, gagasan-gagasan, pandangan-pandangan, asumsi-asumsi secara lebih jelas. Sehingga mereka dapat merumuskan pertanyaan yang lebih *powerful* untuk situasi diri mereka sendiri demikian pula perkembangan kerja-kerja mereka.

---

<sup>9</sup> Rahadi, *Riset Untuk Perubahan Sosial*, (Surakarta: LPTP, 2008). Hal. 9-11.

- (9) Membangun mekanisme *“kritik diri komunitas”* (*self-critical communities*) dari orang-orang yang berpartisipasi dan bekerjasama dalam proses riset yakni perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Hal ini dimaksudkan untuk *membangun orang-orang yang peduli terhadap proses pencerahan (enlightening)* diri mereka sendiri atas pola hubungan antara keadaan, tindakan, dan konsekuensi, begitu pula untuk membebaskan (*emancipating*) diri mereka dari belenggu-belenggu kelembagaan dan personal yang membatasi kekuatan mereka untuk hidup lebih manusiawi di atas nilai-nilai sosial yang mereka pilih dan yakini.
- (10) Proses pencerahan dalam melahirkan kesadaran kritis. Kesadaran kritis ini harus terjadi terhadap kedua belah pihak, baik orang yang melakukan pencerahan dan komunitas yang tercerahkan.

Sepuluh prinsip kerja ini merupakan bagian-bagian yang tidak terpisah, menyatu menjadi sebuah kerja kolektif antara tim PKM dengan komunitas. Mereka secara kolaboratif membangun pengetahuan untuk tindakan sosial dan perubahan sosial. Tindakan sosial dan perubahan sosial ini dimulai dari munculnya kesadaran kritis antara tim PKM dan komunitas atas pengetahuan situasi sosial yang terjadi. Dengan demikian diantara mereka terbangun usaha melakukan analisis untuk melakukan gerakan sosial, memecahkan secara teknis persoalan-persoalan mendasar yang menimpanya.<sup>10</sup> Dari sini tumbuh pengetahuan-pengetahuan baru baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Proses yang demikian ini merupakan proses membangun pengetahuan komunitas yang lebih sah, karena pengetahuan tidak didominasi oleh pihak peneliti atau fasilitator PKM, tetapi dibangun secara bersama-sama.

### **G. Strategi Pemberdayaan PKM dengan Pendekatan PAR**

Strategi yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa pelaksana PKM PAR harus dimulai dengan tindakan mikro yang memiliki konteks makro/global. Tindakan mikro dimaksud adalah penyelesaian masalah-masalah kecil yang memiliki konteks mendasar dan terkait dengan konteks makro. Oleh sebab itu strategi ini dilaksanakan dengan pendekatan penguasaan-penguasaan pengetahuan teknis masyarakat, sehingga masyarakat secara langsung merasakan proses keterlibatannya dalam perubahan sosial yang dibangun oleh PKM ini.<sup>11</sup>

Strategi berikutnya adalah dosen/mahasiswa bersama masyarakat membangun kelembagaan komunitas yang fungsional dan berkelanjutan. Kelembagaan ini memiliki fungsi strategis dalam menciptakan kekuatan kolektif dan untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang melilit masyarakat. Dengan kelembagaan ini akan terbangun proses

---

<sup>10</sup> Rajesh Tandon, “Evaluasi dan Riset Partisipatoris: Berbagai Konsep dan Persoalan Pokok” dalam Walter fernandes dan Rajesh Tandon (ed.), *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan*, terj. FX. Baskara T. Wardaya, (Jakarta: PT Graedia Pustaka Utama, 1993). Hal. 21-23.

<sup>11</sup> Rahadi. Dkk. *Belajar Bersama Masyarakat*. (Solo: Susdec, LPTP. 2004), hal 3.

belajar bersama sekaligus menciptakan kesadaran kolektif, karena ada proses pemahaman keagamaan yang transformatif.<sup>12</sup>

Dengan kelembagaan tersebut juga menjadi wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan penguasaan dan pengelolaan serta kontrol terhadap sumberdaya alam dan manusia (terutama sumberdaya ekonomi). Bahkan pengembangan sektor ekonomi strategis mampu digerakkan dari kelembagaan komunitas yang telah dibangun ini, tentunya ekonomi strategis yang sesuai dengan kondisi lokal (daerah).<sup>13</sup>

Strategi berikutnya adalah membangun jaringan ekonomi strategis yang berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. PKM yang diselenggarakan jika mampu menyentuh bidang ini secara langsung, maka hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat, karena memang persoalan kebanyakan masyarakat adalah terkait dengan kebutuhan ekonomi. Keberhasilan ini dilanjutkan dengan perluasan kawasan dan kewilayahan yang menekankan pada aspek kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki masyarakat.<sup>14</sup>

Strategi-strategi ini sifatnya juga tidak terlalu rigid dan kaku, menyesuaikan dengan kondisi komunitas. Hal ini karena prinsip PAR adalah menghargai pengetahuan lokal, mengurai sejarah komunitas, sekaligus menghargai perbedaan perspsi dan strategi yang diinginkan masyarakat. Maka strategi bisa berubah, tetapi prinsip kerja tetap harus dijadikan pedoman.

## **H. Daur Gerakan Sosial PKM PAR**

Adapun daur gerakan sosial dalam proses perubahan komunitas, sesuai dengan daur gerakan sosial dalam *Participatory Action Research* (PAR) adalah sebagai berikut.<sup>15</sup>

### **1) Pemetaan Awal (*Preleminary mapping*)**

Pemetaan awal sebagai alat untuk memahami komunitas, sehingga dosen/mahasiswa akan mudah memahami realitas problem dan relasi sosial yang terjadi. Dengan demikian akan memudahkan masuk ke dalam komunitas baik melalui *key people* (kunci masyarakat) maupun komunitas akar rumput yang sudah terbangun, seperti kelompok keagamaan (yasinan, tahlilan, masjid, mushalla dll.), kelompok kebudayaan (kelompok seniman, dan komunitas kebudayaan lokal), maupun kelompok ekonomi (petani, pedagang, pengrajin dll.).

### **2) Membangun hubungan kemanusiaan**

---

<sup>12</sup> Ibid. Hal. 4.

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 5.

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 6.

<sup>15</sup> Zainuddin MZ, dkk. *Modul Pelatihan Kuliah Nyata Transformatif IAIN Sunan Ampel*, (Surabaya: LPM IAIN Sunan Ampel 2010). 36-39.

Dosen/mahasiswa dan dosen pendamping melakukan inkulturasi dan membangun kepercayaan (*trust building*) dengan masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang setara dan saling mendukung. Dosen/mahasiswa PKM dan masyarakat bisa menyatu menjadi sebuah simbiosis mutualisme untuk melakukan riset, belajar memahami masalahnya, dan memecahkan persoalannya secara bersama-sama (*partisipatif*).

### 3) Penentuan Agenda Riset untuk Perubahan Sosial

Dosen/mahasiswa bersama komunitas mengagendakan program riset melalui teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk memahami persoalan masyarakat yang selanjutnya menjadi alat perubahan sosial. Dalam proses ini dosen/mahasiswa dan masyarakat juga merintis membangun kelompok-kelompok komunitas, sesuai dengan potensi dan keragaman yang ada.

### 4) Pemetaan Partisipatif (*Participatory Mapping*)

Dalam kelompok-kelompok komunitas tersebut, dosen/mahasiswa memfasilitasi proses belajar dengan bersama untuk melakukan pemetaan wilayah. Pemetaan ini akan dihasilkan sebuah gambaran umum kondisi geografis, social, dan persoalan yang dialami masyarakat. Pemetaan biasanya sebagai langkah awal dari memahami kondisi masyarakat. Dari pemetaan ini dilanjutkan dengan identifikasi masalah masyarakat melalui teknik-teknik PRA yang lain, seperti Transekt, Diagram Ven, Diagram Alur, kalender musim, kalender harian, alur sejarah komunitas, dan lain-lain.

### 5) Merumuskan Masalah Kemanusiaan

Komunitas merumuskan masalah mendasar hajat hidup kemanusiaan yang dialaminya. Seperti persoalan pangan, papan, kesehatan, pendidikan, energi, lingkungan hidup, dan persoalan utama kemanusiaan lainnya. Teknik yang mudah untuk merumuskan persoalan ini biasanya dengan analisis pohon masalah (hirarki masalah), yang selanjutnya dibuat analisis pohon tujuan. Selanjutnya dilengkapi dengan teknik matrik rangking sebagai langkah untuk memilih prioritas persoalan mana yang akan diselesaikan lebih dahulu.

### 6) Menyusun Strategi Gerakan

Komunitas menyusun strategi gerakan untuk memecahkan problem kemanusiaan yang telah dirumuskan. Menentukan langkah sistematis, menentukan pihak yang terlibat (*stakeholders*), dan merumuskan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program yang direncanakannya serta mencari jalan keluar apabila terdapat kendala yang menghalangi keberhasilan program. Penyusunan strategi gerakan ini merupakan langkah penting untuk pemecahan masalah. Langkah mudah untuk menyusun gerakan ini adalah dengan teknik mengelola program yang berbentuk *Logical Framework Approach* (LFA).



#### 7) Pengorganisasian Masyarakat

Komunitas didampingi dosen/mahasiswa PKM membangun pranata-pranata sosial. Baik dalam bentuk kelompok-kelompok kerja, maupun lembaga-lembaga masyarakat yang riil bergerak memecahkan problem sosialnya secara simultan. Demikian pula membentuk jaringan-jaringan antar kelompok kerja dan antara kelompok kerja dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan program aksi yang direncanakan.

#### 8) Melancarkan Aksi Perubahan

Aksi memecahkan problem dilakukan secara simultan dan partisipatif. Program pemecahan persoalan kemanusiaan bukan sekedar untuk menyelesaikan persoalan itu sendiri, tetapi merupakan proses pembelajaran masyarakat, sehingga terbangun pranata baru dalam komunitas dan sekaligus memunculkan *community organizer* (pengorganisir dari masyarakat sendiri) dan akhirnya akan muncul *local leader* (pemimpin lokal) yang menjadi pelaku dan pemimpin perubahan.

#### 9) Membangun Pusat-pusat Belajar Masyarakat

Pusat-pusat belajar dibangun atas dasar kebutuhan kelompok-kelompok komunitas yang sudah bergerak melakukan aksi perubahan. Pusat belajar merupakan media komunikasi, riset, diskusi, dan segala aspek untuk merencanakan, mengorganisir dan memecahkan problem social. Oleh sebab terbangunnya pusat-pusat belajar merupakan salah satu bukti munculnya pranata baru sebagai awal perubahan dalam komunitas masyarakat. Bersama masyarakat pusat-pusat belajar diwujudkan dalam komunitas-komunitas kelompok sesuai dengan ragam potensi dan kebutuhan masyarakat. Seperti kelompok belajar perempuan petani, kelompok perempuan pengrajin, kelompok tani, kelompok pemuda, dan sebagainya. Kelompok tidak harus dalam skala besar, tetapi yang penting adalah kelompok memiliki anggota tetap dan kegiatan belajar berjalan dengan rutin dan terealisasi dalam kegiatan yang terprogram, terencana, dan terevaluasi. Dengan demikian kelompok belajar merupakan motor penggerak masyarakat untuk melakukan aksi perubahan.

#### 10) Refleksi (Teoritisasi Perubahan Sosial)

Dosen/mahasiswa PKM bersama komunitas merumuskan teoritisasi perubahan sosial. Berdasarkan atas hasil riset, proses pembelajaran masyarakat, dan program-program aksi yang sudah terlaksana, dosen/mahasiswa dan komunitas merefleksikan semua proses dan hasil yang diperolehnya(dari awal sampai akhir). Refleksi teoritis dirumuskan secara bersama, sehingga menjadi sebuah teori akademik yang dapat dipresentasikan pada khalayak publik sebagai pertanggungjawaban akademik.

#### 11) Meluaskan Skala Gerakan dan Dukungan

Keberhasilan program PKM Transformatif tidak hanya diukur dari hasil kegiatan selama proses, tetapi juga diukur dari tingkat keberlanjutan program

(*sustainability*) yang sudah berjalan dan munculnya pengorganisir-pengorganisir serta pemimpin lokal yang melanjutkan program untuk melakukan aksi perubahan. Oleh sebab itu, bersama komunitas dosen/mahasiswa memperluas skala gerakan dan kegiatan. Mereka membangun kelompok komunitas baru di wilayah-wilayah baru yang dimotori oleh kelompok dan pengorganisir yang sudah ada. Bahkan diharapkan komunitas-komunitas baru itu dibangun oleh masyarakat secara mandiri tanpa harus difasilitasi oleh dosen/mahasiswa PKM. Dengan demikian masyarakat akan bisa belajar sendiri, melakukan riset, dan memecahkan problem sosialnya secara mandiri.

Daur gerakan yang demikian sifatnya terus berputar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan PKM Transformatif tidak bisa dilaksanakan hanya dalam satu atau dua kali kegiatan, melainkan terus berkesinambungan. Program diharuskan berkelanjutan, terpadu, dan tersistem, sehingga sampai ada titik transformasi sosial. Oleh karena itu, target waktu tidak bisa dipastikan. Yang bisa dipastikan hanya target program. Karena itu dalam waktu jangka pendek target tujuan program bisa dipastikan tercapai atau tidak. Akan tetapi kalau target perubahan sosial tidak bisa ditentukan kapan bisa dicapai, tergantung pada kualitas dan intensitas proses pelaksanaan PKM pada komunitas.

#### **I. Peran Dosen/mahasiswa dalam PKM Transformatif**

Berdasarkan atas pola daur gerakan di atas, maka peran dosen/mahasiswa dalam PKM Transformatif adalah menjadi fasilitator, animator, inisiator, dan catalisator komunitas dampingan, bukan pihak yang paling dominan. Peran dosen/mahasiswa harus berdasarkan pada etika lokal, sehingga mereka menjadi bagian dari masyarakat dan terbangun hubungan yang humanis.

Peran sebagai *fasilitator* adalah peran dalam menciptakan proses yang dapat membantu masyarakat mendiskusikan dan merefleksikan situasi sosial kehidupannya dan keberagamaannya secara kritis, mengidentifikasi dan merumuskan isu masalah, mengidentifikasi solusi dan menyusun perencanaan, mengatasi masalah, memonitor, dan mengevaluasi program aksi. Peran *animator* merupakan peran dalam menciptakan proses yang dapat membantu masyarakat menemukan dan mendayagunakan potensi keswadayaannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Termasuk didalamnya mendorong masyarakat berfikir kritis, memiliki kepedulian, berbagi informasi, dan memunculkan gagasan-gagasan baru.<sup>16</sup>

Peran insiator (*enabler*) adalah upaya menciptakan proses yang dapat membantu masyarakat berinisiasi secara bebas dan kreatif untuk mengembangkan agenda-agenda program sosial keagamaan dilingkungannya sebagai bagian dari proses perubahan sosial, serta mengurangi ketergantungan melalui penciptaan kerjasama program aksi dan pendidikan sosial keagamaan. Adapun peran sebagai katalisator (*catalyst*) merupakan peran menciptakan proses yang dapat membantu masyarakat mengorganisasikan gagasan dan sumberdayanya, serta membangun pola hubungan kerjasama (*partnership*) dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam maupun di luar masyarakat tersebut. Termasuk menyelesaikan konflik-konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid. 23.

<sup>17</sup> Ibid.

## **J. Penutup**

Terapan PKM yang menggunakan metodologi PAR memang tidak mudah untuk sepenuhnya dapat dilaksanakan secara ideal, namun usaha penerapan perlu diujicobakan bagi PTAI yang belum, tetapi bagi PTAI yang sudah menerapkan perlu perbaikan secara terus menerus. Peningkatan kualitas pemahaman tentang metodologi dan keterampilan PAR bagi dosen dan mahasiswa perlu terus diusahakan. Usaha peningkatan itu bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau oleh fakultas. Akan lebih baik jika materi-materi tentang PAR dapat dijadikan sebagai mata kuliah, sebagai mata kuliah utama atau mata kuliah pilihan, sehingga ketika mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat baik dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau dalam bentuk lain dapat langsung diterapkan.

Di sisi yang lain kebijakan penggunaan PAR sebagai metodologi dalam PKM di PTAI perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih berpihak. Baik kebijakan yang terkait dengan struktur kelembagaan, kurikulum, maupun anggaran. Sehingga PKM dan PAR tidak dipandang sebelah mata oleh PTAI. Kebanyakan PKM selama ini hanya dianggap sebagai pelengkap tri dharma perguruan tinggi, padahal harusnya PKM merupakan satu kesatuan dengan darma yang lain. Jika kebijakan pimpinan PTAI lebih berpihak terhadap eksistensi PKM dan PAR sebagai metodologi, maka pelaksanaan PKM di PTAI niscaya akan lebih efektif. PKM akan dapat terlaksana dengan lebih sistematis, terprogram dengan pasti, dan berkelanjutan, sehingga eksistensi PTAI di mata masyarakat akan memiliki makna yang lebih baik, dibanding selama ini hanya sebagai menara gading.